BAB V

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai Pemberdayaan KPH Blitar Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dan Peluang Potensi Kemitraannya (Studi di Desa Sukorejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung), peneliti memaparkan hasil penelitian dengan mencocokkan data hasil temuan dengan teori-teori dan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan oleh peneliti sehingga memperoleh hasil sebagai berikut :

A. Kontribusi Perum Perhutani terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dapat menganalisis bahwa Perum Perhutani sebagai Badan Usaha milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan hutan. Memiliki kerjasama yang baik dengan LMDHnya, sehingga tercipta hubungan yang baik dan harmonis.

Lembaga Masyarakat Desa Hutan Lembaga adalah wadah dimana sekumpulan orang berinisiatif untuk memenuhi kebutuhan bersama, dan yang berfungsi mengatur akan kebutuhan bersama tersebut dengan nilai dan aturan bersama. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah satu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang berada didalam atau disekitar hutan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhannya melalui

interaksi terhadap hutan dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya.¹⁰³

Manfaat adanya LMDH yaitu :

- a. Untuk memenuhi kebutuhan
- b. Untuk menghasilkan peningkatan kemampuan lembaga dalam pengelolaan lembaga secara tunggal maupun kolektif
- c. Serta mendorong lembaga untuk memiliki kekuatan dalam menghadapi dan berinteraksi dengan pihak luar, baik dalam daya dukung maupun dalam daya saing (kemampuan bernegosiasi).

Perum Perhutani selalu melibatkan masyarakat dalam semua kegiatan. Kontribusi yang diberikan Perum Perhutani dengan masyarakat juga menjadi salah satu hal yang membuat hubungan baik dengan LMDHnya. Kontribusi Perum Perhutani ialah sebagai berikut :

- a. Sharing produksi kayu tebangan
- b. Sharing produksi non kayu (getah, wisata)
- c. Pemanfaatan lahan (penanaman palawija)
- d. PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) program ini memberikan pinjaman lunak kepada masyarakat sekitar hutan untuk modal usaha.

¹⁰³ San Afri Awang, et. All., *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)*. (Yogyakarta: French Agricultural Research Centre For International Development, 2008), hlm 13

Bentuk-bentuk kontribusi Perum Perhutani:

- a. Pemberian uang sharing kepada lembaga masyarakat desa hutan sesuai hasil produksi yang diberikan
- b. Masyarakat dapat melakukan penanaman palawija dibawah tegakan dalam pola tumpangsari
- c. Memberikan modal usaha bagi masyarakat sekitar hutan dalam bentuk pinjaman lunak

Pemberian upah untuk masyarakat dilihat dari tebang tanaman dan juga dilihat dari beberapa kegiatan. Dilihat dari segi manfaat hutan sendiri tentunya contoh kegiatannya seperti :

- c. Kegiatan tanaman tebang persemaian
- d. Pemeliharaan

Pemberian upah dilihat berdasarkan masyarakat melakukan penanaman atau tebangan. Masyarakat sebagai pekerja disitulah masyarakat di beri upah harian. Upah harian tanaman kurang lebih Rp. 100.000 ribu/hari. Sedangkan upah harian tebangan diberikan per-kibik atau hal tersebut bisa juga dilihat dari kegiatan dalam pembuatan tanaman atau tebangan. Masyarakat dibayar atau digaji setiap melakukan kegiatan.

Perum Perhutani juga memberikan kemudahan terhadap masyarakat sekitar hutan untuk melakukan tumpang sari. Sistem tumpang sari ini juga di rasakan manfaatnya oleh masyarakat karena mampu mengangkat perekonomian masyarakat sekitar hutan. Tumpang sari dapat dilakukan pada tanaman sampai umur ke tiga (tutup kontrak). Jika ingin melakukan tumpang sari kembali dapat melakukan perpanjangan kontrak dan membuat usulan, dengan membuat perpanjangan kerjasama.

Pengambilan kayu bakar oleh masyarakat diperbolehkan oleh pihak Perum Perhutani untuk kegiatan memasak dan dapat dicukupi melalui pemungutan ranting-ranting kering atau dahan berukuran dibawah diameter 7 cm. Kegiatan pengambilan ranting-ranting ini boleh dilakukan selama tidak merusak tanaman, karena bisa mengganggu pertumbuhan tanaman atau merusak ekosistem. Dan boleh dilakukan selama tidak masuk menjadi kayu pekakas pada lokasi tebangan.

Seringnya terjadi kegiatan dengan masyarakat sekitar hutan membuat Perum Perhutani semakin mudah untuk menjalankan semua kegiatannya. Misalnya dibidang persemaian dan patroli atau bakti sosial. Menurut salah satu narasumber, mengatakan bahwa dengan adanya pengelolaan hutan bersama Perum

Perhutani, masyarakat mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu masyarakat lebih diutamakan dalam kegiatan lahan habis tebang. Kegiatan habis tebang Perum Perhutani memberikan lahan yang kemudian lahan tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk ditanami sayur-sayuran atau tanaman pokok lainnya yang bisa menambah penghasilan masyarakat.

Perum Perhutani ikut memajukan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan 8 Asper meliputi :

- 1) Asper campurdarat
- 2) Asper Kalidawir
- 3) Asper Rejotangan
- 4) Asper Lodoyo Timur
- 5) Asper Lodoyo Barat
- 6) Asper Kesamben
- 7) Asper Wlingi

Selanjutnya penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Probo Sutejo yang menghasilkan kesimpulan bahwa dengan adanya program kemitraan Perum Perhutani bersama masyarakat desa, ternyata mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Besarnya peningkatan pendapatan yang di

peroleh petani dari keikutsertaan secara keseluruhan rata-rata pendapatan selama satu tahun cukup besar.¹⁰⁴

B. Tawaran kemitraan yang diberikan oleh Perum Perhutani kepada masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan hasil wawancara Perum Perhutani mulai melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan produksinya pada tahun 1974. Program pertama yang dibuat ialah *prosperity approach* (pendekatan kemakmuran). Beberapa program dan faktor pendukungnya disusun untuk meningkatkan peranan hutan ikut dalam memakmurkan masyarakat di sekitar hutan. Seperti proyek kegiatan sebagai berikut :

- a. Bidang persemaian (masyarakat mendapatkan upah)
- b. Kegiatan memasang acir (bambu)
- c. Kegiatan tebangan (masyarakat mendapatkan upah atau jaminan keselamatan kerja).

Perum Perhutani memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar hutan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari kegiatan tersebut dapat menambah penghasilan masyarakat (sharing produksi kayu). HPD (Hutan Pangkuan Desa) pada saat tebangan memberikan cash back (sharing produksi kayu).

¹⁰⁴ Probo Sutejo, "Hubungan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat", dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan Geografi*, Vol. 2, No. 01, Oktober 2014

Sharing produksi kayu bisa diterima saat kegiatan tebangan sudah selesai.

Dengan adanya pembagian hasil usaha pengelolaan hutan disetiap kegiatan, masyarakat akan mendapatkan bagian dari hasil usaha tersebut. Pembagian hasil usaha yang mereka terima secara tidak langsung akan meningkatkan pendapat ekonomi masyarakat guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Menurut Sukirno, pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan.¹⁰⁵ Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian dari Theresia Avila dan Bambang Suyadi yang berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaan PHBM (Pemberdayaan Hutan Bersama Masyarakat) masyarakat mendapatkan manfaat secara ekonomi yang berasal dari kegiatan bagi hasil atau sharing yang diperoleh. Sehingga dengan adanya kegiatan PHBM sangatlah bermanfaat karena secara ekonomi mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.¹⁰⁶

Selain hal itu, dengan adanya aktivitas masyarakat yang ikut serta dalam pengelolaan hutan juga meningkatkan keamanan dan kelestarian dari sumberdaya hutan itu sendiri. Hal ini disebabkan masyarakat sering pergi ke lahan atau hutan sehingga

¹⁰⁵ Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), Hal. 47.

¹⁰⁶ Theresia Avila dan Bambang Suyadi. *Dampak ekonomi implementasi program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pada PERUM PERHUTANI unit II Jawa Timur*. Jurnal Pendidikan Ekonomi. Universitas Negeri Jember. Vol. 9 No. 2 Tahun 2015.

secara tidak langsung keamanan hutan dapat dipantau dengan baik dan angka pencurian sumberdaya hutan serta penyalahgunaan lahan hutan secara ilegal dapat diturunkan.

PHBM (Pemberdayaan Hutan Bersama Masyarakat) menawarkan kayu sebesar 25% untuk masyarakat dan 75% untuk Perum Perhutani. Hasil yang diperoleh masyarakat tersebut dibarengi dengan hak dan kewajiban seperti yang termuat dalam pasal 22 SK PHBM, yaitu :

1. Masyarakat desa hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama masyarakat berhak :
 - a. Bersama perusahaan menyusun rencana, melakukan monitorin dan evaluasi
 - b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi factor produksi yang dikontribusikan
 - c. Memperoleh fasilitasi dari Perusahaan dana atau Pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.
2. Masyarakat desa hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat berkewajiban :
 - a. Bersama perusahaan menjaga dan melindungi sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.
 - b. Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai kemampuannya.

- c. Mempersiapkan kelompok untuk mengoptimalkan fasilitasi yang diberikan oleh perusahaan atau pihak yang berkepentingan.

PHBM dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Direktur Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Adapun tujuan PHBM yang tertuang di SK (Surat Keputusan) tersebut adalah :

1. Meningkatkan tanggung jawab perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.
2. Meningkatkan peran perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan.
3. Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai dengan kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan.
4. Meningkatkan mutu sumberdaya hutan sesuai dengan karakteristik wilayah
5. Meningkatkan pendapatan perusahaan, masyarakat desa hutan serta pihak yang berkepentingan secara simultan.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Surat Keputusan Direksi No. 136/KPTS/DIR/2001 Tentang *Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat*

Program Perum Perhutani dengan menggandeng masyarakat sekitar hutan yaitu Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), program ini fungsinya yaitu memberikan kemudahan pinjaman lunak untuk masyarakat. Contohnya ikan koi, ayam, dan lain-lain. Serta hibah (hadiah) berupa sarana umum, mushola, air bersih, dan lain-lain.

Adapun kerjasama Perum Perhutani dengan masyarakat yaitu:

- a. Tanaman sengon
- b. Wisata

Perum Perhutani dalam melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) ada perjanjian tertulis terkait tentang pengelolaan hutan bersama masyarakat yaitu:

- a. Agroforestree
- b. Agrowisata
- c. Pantai
- d. Bukit jodoh
- e. Sirah Kencong, dan lain-lain.
- f. Tanaman sengon (swadaya)

C. Bagaimana upaya Perum Perhutani dalam menjalin hubungan masyarakat sekitar di Desa Sukorejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, kontribusi yang dapat diberikan Perum Perhutani kepada

masayarakat desa ialah memberikan fasilitas dalam bentuk kerjasama, pengelolaan kawasan hutan (sharing produksi). Menurut salah seorang sumber, kontribusi dari Perum Perhutani dalam bentuk upah maupun hasil tumpang sari nilainya cukup besar. Disamping itu petani desa Sukorejo mendapat tambahan lahan yang cukup luas dengan menggarap lahan Perhutani. Kontribusi yang cukup besar tersebut mencakup kayu untuk pekakas atau kayu gelondongan, rumput hasil dari pengolahan lahan kosong hutan negara.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) jenis kontribusi dari hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani, yaitu kontribusi berdsarkan kerelaan perusahaan atau kontribusi resmi, dan kontribusi yang diambil langsung dari hutan negara. Kontribusi resmi diberikan kepada masyarakat dalam bentuk upah, hasil tumpangsari, dan kayu bakar. Sedangkan kontribusi yang diambil langsung oleh masyarakat desa Sukorejo berupa kayu bakar, rumput, pengelolaan lahan hutan. Sedangkan kontribusi resmi yang diberikan Perum Perhutani nilainya cukup besar yaitu, setiap kegiatan bisa Rp. 100.000/kegiatan.

Menurut Simon dalam bukunya “Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat”, program pertama yang dirancangkan oleh Perum Perhutani berdasarkan pengalamannya menjadi PN Perhutani adalah *prosperity approach* (pendekatan kemakmuran), yang dimulai pada tahun 1974. Beberapa paket program dan factor

pendukungnya disusun untuk meningkatkan peranan hutan dalam ikut memakmurkan masyarakat di sekitarnya, seperti proyek lebah madu, penanaman rumput gajah, air bersih, tumpangsari dan sebagainya.¹⁰⁸

Berikut ialah aturan eksploitasi hutan yang sudah dirangkum di UU 41 Tahun 1999 Pasal 50 yang berbunyi :

- 1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- 2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- 3) Setiap orang dilarang :
 - a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah
 - b. Merambah kawasan hutan
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
 - a) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau
 - b) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa
 - c) 100 (serratus) meter dari kiri kanan tepi sungai

¹⁰⁸ Simon Hasanu, *Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat: Teori dan Aplikasi Pada Hutan Jati di Jawa*. (Bandung: Yayasan AK3, 2006), hlm. 33

- d) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai
 - e) 2 (dua) kali kedalam jurang dari tepi jurang
 - f) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai
- d. Membakar hutan
 - e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang
 - f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah
 - g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri
 - h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
 - i. Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang
 - j. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil

hutan didalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang

- k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
- l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan dan
- m. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Muhamad Rizal, menghasilkan kerjasama antara perum perhutani dalam menjaga kelestarian hutan beserta kesejahteraan masyarakat harus selalu ditingkatkan dengan menekankan prinsip kemitraan dengan saling mengerti kebutuhan satu sama lain, dan tidak lepas dari fasilitas yang diberikan Perum Perhutani kepada masyarakat yaitu dalam bentuk kerjasama, dan pengelolaan kawasan hutan (sharing produksi).¹⁰⁹

¹⁰⁹ Mohamad Rizal, dkk., “Kemitraan antara KPH Perhutani dan LMDH dalam menjaga kelestarian hutan” dalam *Jurnal Administrasi Public (JAB)*, Vol. 02, No.02